

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di suatu negara yang diiringi dengan penambahan angkatan kerja telah menimbulkan masalah tersendiri. Hal ini antara lain disebabkan belum berfungsinya semua sektor kehidupan masyarakat dengan baik serta belum meratanya pembangunan dari segala bidang sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan dinamis. Sektor formal tidak mampu memenuhi dan menyerap pertumbuhan angkatan kerja secara maksimal yang disebabkan adanya ketimpangan antara angkatan kerja yang bertumbuh pesat dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini dapat menyebabkan sektor informal menjadi suatu bagian yang penting dalam menjawab lapangan pekerjaan dan angkatan kerja, salah satunya adalah pengembangan Industri Mikro dan Kecil. Peran dari Industri Mikro dan Kecil dalam perekonomian Indonesia sudah diakui masyarakat secara luas pada saat negara Indonesia menghadapi tantangan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ekonomi secara nyata telah menyebabkan jatuhnya ekonomi nasional khususnya usaha-usaha besar pada semua sektor termasuk industri, jasa dan perdagangan (Herdiana, 2013).

Di Indonesia masalah ketenagakerjaan masih menjadi masalah utama. Kurangnya lapangan pekerjaan, sementara tenaga kerja yang setiap tahunnya terus bertambah mengakibatkan banyak pengangguran dimana-mana.

Permasalahan ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sering terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Dan untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan atau pengangguran ini memerlukan proses yang cukup panjang. Lapangan pekerjaan merupakan tempat dimana manusia memperoleh pendapatan, karena tingkat kemakmuran keluarga dapat dinilai dari besar atau kecilnya pendapatan. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja akan dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Secara tradisional pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam memacu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Ziyadaturrofiqoh, Zulfanetti, dan Safari 2018).

Suatu perekonomian yang berkembang pesat berkembang pesat bukanlah jaminan negara tersebut dikatakan sejahtera apabila tidak diikuti dengan perluasan kesempatan pekerjaan untuk menampung para tenaga kerja yang baru. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dengan jumlah penduduk angkatan kerja yang meningkat merupakan masalah utama dalam bidang ketenagakerjaan. Meningkatnya jumlah penduduk dapat diartikan bahwa akan terjadi penambahan jumlah angkatan kerja, maka dari itu penambahan angkatan kerja perlu diimbangi dengan perluasan lapangan kerja. Tingginya suatu angka angkatan kerja adalah salah satu hal yang dapat terjadi jika tidak ada keseimbangan antara dua hal tersebut.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator yang harus dilakukan oleh suatu Negara untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Di Indonesia salah satu

faktor dari masalah pembangunan ekonomi yaitu jumlah angkatan kerja dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Keberhasilan pembangunan ekonomi bukan hanya tertuju pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga penyelesaian masalah-masalah ekonomi salah satunya yaitu penuntasan masalah ketengakerjaan. Pertumbuhan angkatan kerja yang cepat akan memberikan beban bagi perekonomian, yaitu perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Lapangan kerja merupakan suatu tempat dimana seseorang mendapat penghasilan, besar kecilnya penghasilan merupakan faktor dari tingkat kemakmuran suatu keluarga. Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan upah kepada seseorang yang bekerja harus dengan ketentuan dan syariat islam. Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang juga diisyaratkan Allah dalam Al-Quran surat Ali-Imran Ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahan:

“Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rosul-rosul Nya dan mengerjakan amal sholeh, maka Allah akan memberi mereka pahala amal-amal mereka secara sempurna tanpa pengurangan. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim dengan berbuat syirik dan kekufuran”

Masalah yang paling utama dihadapi kebanyakan negara berkembang termasuk negara Indonesia sampai saat ini adalah bagaimana memanfaatkan faktor manusia yang melimpah dan kebanyakan tidak terlatih bagi pembangunannya, sehingga penduduk yang besar bukan merupakan beban pembangunan, justru menjadi modal pembangunan. Sebagian besar penduduk di negara berkembang berada di sektor pertanian tradisonal yang sering

menghadapi berbagai masalah pengangguran terselubung. Produktivitas pekerja sangat rendah. Produktivitas adalah tingkat produksi yang dapat dihasilkan seorang pekerja per tahun. Dibandingkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di negara maju, tingkat produktivitas seorang di negara berkembang masih relatif sangat rendah.

Dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanyalah pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non upah. Penyerapan tenaga kerja yaitu jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Handoko (Dalam Herdiana, 2013).

Penduduk memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Peranan penduduk memiliki keunikan dalam pembangunan ini menempatkan posisi yang krusial yaitu sebagai penggerak pembangunan atau justru sebagai penghambat pembangunan. Penduduk sebagai penggerak pembangunan apabila penduduk merupakan SDM yang produktif sehingga mampu menciptakan nilai tambah (value added) dalam kegiatan ekonomi.

Sedangkan penduduk menjadi penghambat pembangunan apabila jumlah penduduk yang banyak tetapi tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas SDM sehingga menjadi beban bagi pembangunan. Kebijakan peningkatan produktivitas tenaga kerja menyangkut aspek peningkatan ketrampilan, etos kerja, sikap disiplin, inovatif, kreatif dan peduli terhadap kondisi lingkungan. Pembangunan SDM yang berkualitas tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan pemerintah semata tetapi harus melibatkan campur tangan dari masyarakat dan dunia usaha (Yuliadi, 2003).

Pembangunan industri dan proses industrialisasi adalah salah satu jalur untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat untuk dapat mencapai kehidupan yang lebih maju dan memiliki taraf hidup yang lebih baik lagi. Suatu negara yang menginginkan pembangunan ekonominya berjalan dengan baik adalah dengan cara menempuh strategi industrialisasi. Indonesia merupakan negara yang tergolong memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dengan peringkat ke-empat dari Amerika, India, dan China yaitu kurang lebih sebanyak 250 juta penduduk tersebar di 34 Provinsi di wilayah Indonesia. Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak dan perkembangan industri maka terdapat peluang agar dapat menyerap tenaga kerja. Seiring bertambahnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, industrialisasi dilakukan dari waktu ke waktu dengan salah satu tujuannya yaitu untuk dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Pengembangan sektor

industri inilah yang akan menjadi salah satu cara untuk dapat memperluas penyerapan tenaga kerja, hal ini juga bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Proses pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan peranan sektor industri karena pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan proses industrialisasi. Dari pengalaman negara-negara maju dalam membangun perekonomiannya dimulai dengan membangun sektor industri yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dari produk yang dihasilkannya. Contohnya Jepang dan Korea merupakan gambaran yang tepat untuk menggambarkan negara yang telah sukses membangun perekonomiannya melalui pengembangan sektor industri. Walaupun kedua negara tersebut relatif kurang dalam sumber daya alam namun dengan kemampuan inovasi dan teknologi yang dikuasainya mampu menciptakan produk-produk industri yang berkualitas dan kompetitif. Sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu-ilmu dasar dan teknologi di bidang rekayasa industri (Yuliadi, 2009).

Tabel 1.1

**Jumlah Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil di Indonesia Menurut Pulau
di Indonesia Tahun 2014-2018**

Pulau	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sumatera	1.122.529	889.549	1.418.478	1.480.015	1.451.856
Jawa	5.416.395	6.306.435	7.856.238	6.878.476	5.921.127
Bali Nusa	755.071	682.870	941.673	934.702	747.278
Kalimantan	308.019	272.167	347.954	401.877	367.890
Sulawesi	635.884	516.052	978.466	887.872	784.911
Maluku dan Papua	99.120	68.408	164.530	195.654	161.196

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah penyerapan tenaga kerja

Industri Mikro dan Kecil mengalami peningkatan dan penurunan. Jika dilihat dari mulai tahun 2014 di Pulau Sumatera tenaga kerja yang di serap sebesar 1.122.529 jiwa, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 889.549 jiwa, sementara pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar 1.418.478 jiwa, lalu pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 1.480.015 jiwa, namun pada tahun 2018 mengalami penurun sebesar 1.451.856 jiwa. Selanjutnya, di Pulau Jawa yang menduduki tingkat penyerapan tenaga kerja industri mikro dan kecil paling tertinggi yaitu tahun 2014 mencapai 5.416.395, pada tahun selanjutnya 2015 dan 2016 mengalami kenaikan sebesar 6.306.435 jiwadan 7.856.238 jiwa. Namun, di

tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan tenaga kerja sebesar 6.878.476 jiwa dan 5.921.127 jiwa. Di Pulau Bali dan Nusa pada tahun 2014 tenaga kerja yang di serap mencapai 755.071 jiwa, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 682.870 jiwa, di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 941.673 jiwa dan di tahun 2017 dan 2018 kembali mengalami penurunan selama 2 tahun yaitu sebesar 934.702 jiwa dan 747.278 jiwa. Kemudian di Pulau Kalimantan tenaga kerja yang di serap mulai dari tahun 2014 sebesar 308.019 jiwa, namun di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 272.167 jiwa, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 347.954 jiwa dan 401.877 jiwa, tetapi di tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 367.890 jiwa.

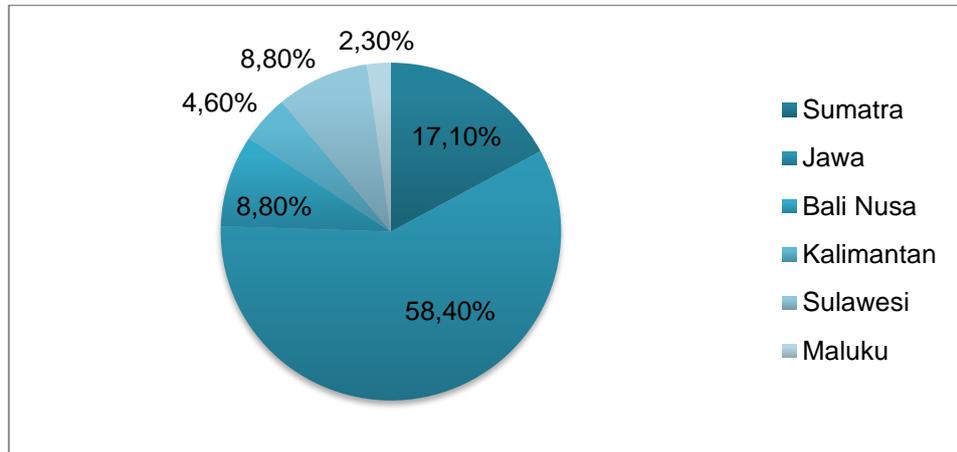
Pulau Sulawesi juga mengalami penurunan dan peningkatan yaitu dimulai dari tahun 2014 penyerapan tenaga kerja sebesar 635.884 jiwa, lalu terjadi penurunan di tahun 2015 sebesar 516.052 jiwa, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 978.466 jiwa. Pada tahun 2017 dan 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 887.872 jiwa dan 784.911 jiwa dan selanjutnya di Pulau Maluku dan Papua dimulai dari tahun 2014 tenaga kerja yang di serap sebesar 99.120 jiwa lalu di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 68.408 jiwa, kemudian mengalami kenaikan selama dua tahun di tahun 2016 dan 2017 sebesar 164.530 jiwa dan 195.654 jiwa, tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 161.196 jiwa. Usaha pemerintah selain menambah ataupun membangun industri kecil atau industri rumah tangga dalam mengatasi ketenagakerjaan yang ada di masyarakat yaitu

memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum tersebut mempunyai arti yaitu untuk dapat meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga akan meningkatkan upah rata-rata tenaga kerja.

Peran sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama bagi perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan terhadap perekonomian. Secara umum kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Indonesia tahun 2018 sebesar 19,86 persen. Kontribusi ini lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian dan sektor perdagangan yang masing-masing berkontribusi sebesar 12,81 persen dan 13,02 persen. Selain kontribusi melalui nilai tambah produksi, industri pengolahan mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Tahun 2018, industri pengolahan mampu mempekerjakan tenaga kerja 14,72 persen dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia. (Badan Pusat Statistik, 2018).

Dari hasil survei IMK Tahunan 2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah unit usaha/perusahaan IMK di Indonesia tercatat 4,26 juta usaha/perusahaan. Pulau Jawa yang merupakan pulau dengan jumlah penduduk paling padat menjadi daerah yang paling terbanyak usaha IMK nya. Gambar 1 menunjukkan bahwa sebaran IMK di Pulau Jawa mencapai 58,43 persen. Jumlah usaha/perusahaan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur adalah yang paling terbanyak, masing-masing mencapai lebih dari 500 ribu usaha/perusahaan. Kondisi ini sangat berbeda dengan gambaran

usaha/perusahaan di daerah Maluku dan Papua di mana jumlah usaha masing-masing mencapai kurang dari 50 ribu usaha/perusahaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 1.1

Sebaran Usaha/Perusahaan IMK menurut Pulau (%)

Proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam dua pengertian, yaitu tingkat hidup yang lebih maju dan taraf hidup yang berkualitas dengan kata lain, pembangunan industri itu sendiri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan mandiri yang hanya sekedar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik,. Keberhasilan sebuah proses industrialisasi tidak terlepas dari adanya dukungan kapasitas sumber daya manusia yang relevan, dan kemampuan “proses” tersebut dalam memanfaatkan secara optimal setiap sumber daya alam dan sumber daya lainnya tersedia Arsyad (Dalam Endang 2016).

Tabel 1.2

**Jumlah Unit Usaha Industri Mikro dan Kecil di Indonesia menurut Pulau
Tahun 2014-2018**

Pulau	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sumatera	480.692	429.566	594.948	718.468	587.981
Jawa	2.179.090	2.541.665	2.791.930	2.598.164	2.491.686
Bali Nusa	335.366	270.820	358.808	427.306	376.948
Kalimantan	147.181	138.517	150.277	218.339	194.644
Sulawesi	306.806	253.149	387.422	405.078	373.762
Maluku dan Papua	57.179	35.606	65.074	97.333	98.418

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah unit usaha industri mikro dan kecil di Indonesia menurut pulau. Dilihat mulai dari pulau Sumatera pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 480.692 unit, kemudian pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu 429.566 unit. Di tahun selanjutnya yaitu 2016 dan 2017 mengalami peningkatan kembali secara berturut-turut yaitu sebesar 594.948 unit dan 718.468 unit, namun di tahun berikutnya yaitu 2018 mengalami penurunan sebesar 587.981 unit. Kemudian di Pulau Jawa pada tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan jumlah industri sebesar 2.179.090 unit, kemudian tahun selanjutnya 2.541.665 unit dan di tahun 2016 sebesar 2.791.930 unit. Tetapi di tahun selanjutnya mengalami penurunan selama 2 tahun yaitu pada tahun 2017 sebesar 2.598.164 unit dan

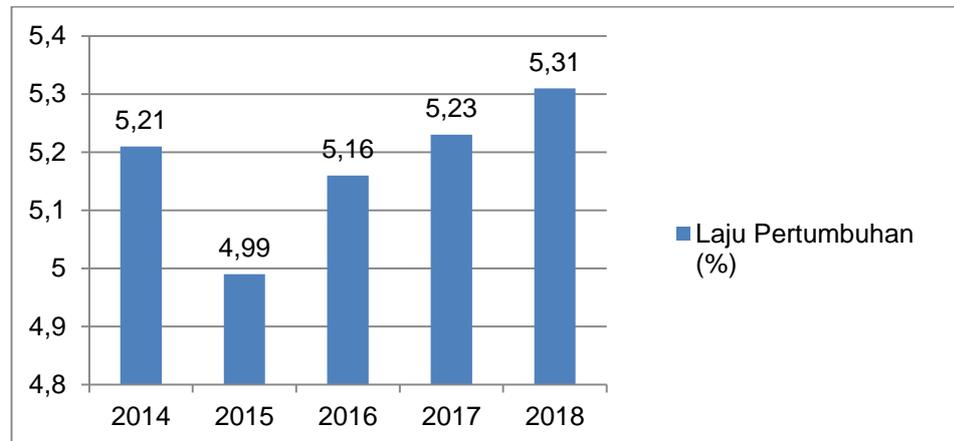
pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2.491.686 unit. Selanjutnya, di Pulau Bali dan Nusa pada tahun 2014 jumlah unit usaha sebesar 335.366 unit, lalu tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 270.820 unit, Kemudian mengalami peningkatan dua tahun berturut-turut pada tahun 2016 sebesar 358.808 unit dan pada tahun 2017 sebesar 427.306 unit. Namun kembali mengalami penurunan sebesar 376.948 pada tahun 2018. Lalu di Pulau Kalimantan sama seperti Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa mengalami peningkatan dan penurunan, dilihat dari tahun 2014 jumlah unit usaha sebesar 147.181 unit, kemudian tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 138.217 unit. Di tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan sebesar 150.277 unit dan 218.339 unit, namun di tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 194.644 unit.

Di Pulau Sulawesi jumlah unit pada tahun 2014 mencapai 306.806 unit, terjadi penurunan sebesar 253.149 unit di tahun 2015, kemudian selama 2 tahun mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 387.422 unit dan terjadi kenaikan kembali di tahun 2017 sebesar 405.078 unit. Namun, di tahun selanjutnya yaitu 2018 mengalami penurunan sebesar 373.762 unit. Selanjutnya di Pulau Maluku dan Papua merupakan jumlah unit usaha paling terendah di Indonesia, dilihat dari tahun 2014 jumlah unit usaha sebesar 57.179 unit, lalu di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 35.606 unit dan di tahun selanjutnya mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2016 jumlah unit usaha sebesar 65.074 unit, kemudian pada

tahun 2017 meningkat sebesar 97.333 unit dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar 98.418 unit.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan yang mana merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Jika PDRB meningkat maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu daerah akan meningkat juga. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan dapat mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja untuk meningkatkan produksi, sehingga terjadinya penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan gambar 1.2 di bawah ini dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Indonesia pada tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 5.21 persen dengan jumlah sebesar Rp 8.603.636 miliar, sementara pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4.99 persen dengan total sebesar Rp 9.033.169 miliar . Kemudian, pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan bila dilihat dari tahun 2016 kenaikan yang terjadi sebesar 5.16 persen dengan jumlah nilai Rp 9.498.833 miliar, lalu pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5.23 persen dengan nilai Rp 9.995.625 miliar dan pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 5.31 persen dengan nilai sebesar Rp 10.526.756 miliar.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.2

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Indonesia

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Industri seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan. Pulau Jawa memiliki nilai PDRB terbesar di Indonesia dar enam pulau yang terletak di Indonesia. Kemudian terbesar kedua terdapat di Pulau Sumatera dan paling terendah merupakan pulau maluku dan papua. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto)atas dasar harga berlaku triwulan I-2018 mencapai Rp 3505,3 triliun dan atas dsar harga konstan 2010 mencapai Rp 2498,4 triliun.

Tabel 1.3

**Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Menurut Pulau di
Indonesia Tahun 2014-2018 (Miliar Rupiah)**

Pulau	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sumatera	1.894.170	1.961.112	2.044.984	2.132.755	2.229.524
Jawa	4.979.136	5.251.789	5.545.720	5.857.629	6.192.835
Bali Nusa	249.269	275.235	291.499	302.309	310.416
Kalimantan	781.344	792.093	807.896	842.968	875.936
Sulawesi	485.290	525.042	563.958	603.214	643.348
Maluku dan Papua	214.428	227.898	244.777	256.750	274.698
Indonesia	8.564.867	8.982.517	9.434.613	9.912.704	10.425.316

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.3 di atas nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pulau di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018 rata-rata mengalami kenaikan. Pulau Jawa menduduki urutan pertama nilai PDRB paling tertinggi pada tahun 2018 sebesar 6.192.835, sedangkan urutan kedua pulau sumatera dengan nilai sebesar 2.229.524 dan urutan ketiga yaitu pulau kalimantan dengan nilai pada tahun 2018 sebesar 875.936. Tiga pulau terendah lainnya yaitu Sulawesi dengan nilai tahun 2018 sebesar 643.348, pulau Bali dan Nusa pada tahun 2018 mencapai 310.416 dan di urutan paling terendah yaitu pulau Maluku dan Papua sebesar 274.698.

Pemerintah diharapkan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan sektor industri. Pengembangan sektor industri akan mengakibatkan kapasitas produksi mengalami peningkatan sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja. Dari pengalaman di berbagai Negara telah membuktikan bahwa industrialisasi sangat penting karena dapat menjamin pertumbuhan. Peranan pada industri kecil memiliki pengaruh yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja, karena industri kecil dapat menampung tenaga kerja yang tidak terserap dari sektor formal. Dalam meningkatkan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan membangun ataupun menambah industri kecil atau industri rumah tangga. Industri mikro dan kecil tidak perlu membutuhkan banyak persyaratan tertentu, seperti keterampilan atau keahlian khusus, tingkat pendidikan yang tinggi, dapat menggunakan teknologi yang sederhana, dan modal yang sedikit. Maka dalam hal ini industri mikro dan kecil merupakan pilihan yang tepat sebab industri kecil bersifat padat karya.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 mencatat kenaikan upah minimum pada seluruh provinsi di Indonesia sebesar 17% dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2015 upah mengalami kenaikan sebesar 12%, pada tahun 2016 pemerintah kembali meningkatkan upah minimum provinsi sebesar 14%, lalu pada tahun 2017 pemerintah juga telah menaikkan 7,9% di seluruh provinsi Indonesia. Pada tahun 2018 pemerintah menaikkan kembali upah minimum provinsi sebesar 8,71%. Keberhasilan suatu usaha dapat diukur dari tingkat penerimaan penjualan atau yang disebut dengan pendapatan pada usaha tersebut. Semakin tingginya tingkat pendapatan yang

di peroleh pada suatu industri menandakan bahwa jumlah produksi yang dihasilkan tinggi. Hal ini terjadi karena permintaan masyarakat oleh perusahaan akan barang ataupun jasa itu mengalami peningkatan. Dalam hal ini memiliki arti bahwa suatu usaha akan mendapatkan pendapatan yang lebih.

Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota. Gubernur menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan usulan dari Komisis Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah. Pengusaha tidak diperbolehkan untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi perusahaan yang tidak mampu untuk membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan upah minimum diatur dalam kepmenakertrans Nomor: Kep-231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Bagi perusahaan perubahan upah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, karena upah merupakan biaya produksi sehingga pengusaha akan meminimalkan biaya produksi, yaitu upah untuk dapat mencapai keuntungan yang optimal. Nialiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi Sumarsono (Dalam Ziyadaturrofiqoh, Zulfanetti, dan Safari 2018).

Tingkat upah yang mengalami kenaikan akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu dengan mengurangi konsumsi atau tidak membeli barang yang bersangkutan kembali. Mengakibatkan banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Menurunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi. Apabila upah mengalami kenaikan maka pengusaha ada yang lebih memilih menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (Herdiana 2013).

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi dari permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada pengaruh variabel jumlah unit usaha, Produk Domestik Regional Bruto Sektor Rill Industri Pengolahan, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Industri Mikro dan Kecil terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia selama 5 tahun yaitu dari tahun 2014-2018.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia tahun 2014-2018.
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Rill Industri Pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia tahun 2014-2018?
3. Bagaimana pengaruh UMP memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia tahun 2014-2018?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia tahun 2014-2018.
2. Untuk menguji pengaruh produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia tahun 2014-2018.
3. Untuk menguji pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia tahun 2014-2018.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini Penulis dapat meningkatkan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, dan Penulis dapat mengetahui pengaruh dari jumlah unit usaha, PDRB Rill Sektor Industri Pengolahan dan UMP terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi bagi Pemerintah, yaitu dalam penentuan kebijakan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan agar Industri Mikro dan Kecil (IMK) lebih diperhatikan dalam perkembangannya.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan yang berguna bagi pembaca dan para pengambil keputusan tentang penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia dan membantu memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya yang masih memiliki hubungan dengan masalah penyerapan tenaga kerja.